

**EFEKTIFITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK
(E-PROCUREMENT) PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA SETDA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

Darlin Sukin Simanjuntak¹, Yosephina Ohoiwutun², Muhlis Hafel³

Universitas Terbuka^{1,2,3}

darlinsimanjuntak22@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-Procurement*) pada BPBJ SETDA Kabupaten Mamberamo Tengah, untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) pada BPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dalam layanan BPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah sudah efektif dilihat dari pencapaian target pekerjaan yang telah dicapai. Sehingga proses penggunaan aplikasi *e-Procurement* sudah dimaksimalkan oleh semua *user* dan proses pelelangan berjalan lancar, integrasi dalam layanan BPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah sudah dilakukan dengan baik dimana Sosialisasi yang dilakukan oleh BPBJ bersifat langsung yang secara periodik rutin dilakukan, BPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah belum memenuhi aspek adaptasi yang baik, karena masih terkendala dengan jaringan internet dan SDM yang belum memadai, Faktor pendukungnya yaitu peningkatan kemampuan SDM dan intensifitas pelatihan-pelatihan dan pengenalan suatu program kepada target sasaran dan Faktor Penghambat dalam penggunaan *e-procument* adalah PBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah adalah: Jaringan internet yang kurang memadai, Medan daerah Kobakma yang sulit untuk dijangkau dan permasalahan virus yang dapat mengganggu berjalannya aplikasi. Simpulan, Efektifitas Penggunaan efektifitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa SETDA Kabupaten Mamberamo Tengah terbagi menjadi 3 aspek

Kata Kunci : *E-Procurement*, Pengadaan Barang dan Jasa, *SDM*.

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the Effectiveness of Electronic Procurement of Goods and Services (E-Procurement) at BPBJ SETDA Central Mamberamo Regency, to describe and analyze what factors support and hinder the Effectiveness of Electronic Procurement of Goods and Services (E-Procurement). Procurement) at BPBJ Central Mamberamo Regency. The method used in this research is a qualitative research method with data collection techniques namely interviews, observation, and documentation. The results of the study show that achieving goals in BPBJ services in Central Mamberamo Regency has been effective as seen from the achievement of work targets that have been achieved. So that the process of using the e-Procurement application has been maximized by all users and the auction process runs smoothly, integration in the Central Mamberamo Regency Regional Secretariat's BPBJ services

has been carried out well, where the socialization carried out by BPBJ is direct and routinely carried out periodically, Central Mamberamo Regency Regional Secretariat's BPBJ has not yet fulfill aspects of good adaptation, because it is still constrained by inadequate internet networks and human resources. Supporting factors include increasing human resource capabilities, intensive training, and introducing a program to targets and factors. The obstacles to using e-procurement are PBJ Regional Secretariat of Central Mamberamo Regency, namely: Inadequate internet network, Medan in the Kobakma area which is difficult to reach, and virus problems which can interfere with the running of the application. Conclusion, Effectiveness The effective use of electronic procurement of goods and services (e-procurement) in the goods and services procurement services section of SETDA Central Mamberamo Regency is divided into 3 aspects

Keywords: E-Procurement, Human Resources, Procurement of Goods and Services

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Setiap instansi pemerintah pasti membutuhkan barang dan jasa yang diperoleh melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa (a) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik; (b) bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan peraturan presiden yang terbaru adalah Perpres No 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa bahwa untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kemudahan bemsaha berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Salah satu perwujudannya adalah dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan proses pengadaan secara elektronik (*e-procurement*).

Pengadaan secara elektronik atau *e-Procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*.

Rahman, et al., (2017), dengan penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Di Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah Infrastruktur LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yakni gedung layanan, ruang pelayanan, ruang nego, ruang verifikasi, ruang registrasi, ruang pelatihan, dan ruang server; *Hardware* LPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain: komputer, laptop, scanner, printer, *wifi/acces point*, lemari, filing kabinet, meja, kursi, AC, lembar registrasi, dan lembar verifikasi; *Software* LPSE Kabupaten Tegal yakni operating system server dan jaringan internet (SPSE 4.3); Kemampuan pegawai dalam menjalankan *e-procurement*, yakni menguasai *microsoft office* dan menguasai teknologi dan informasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Transmisi pengadaan barang/jasa dari manual ke elektronik; Transmisi regulasi; Dokumen yang dipersyaratkan masih harus dievaluasi; Banyak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) mendelegasikan tugas ke staff yang lain. Keterlambatan input RUP (Rencana Umum Pengadaan).

Salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang mencoba menerapkan *e-procurement* tersebut adalah Kabupaten Mamberamo Tengah, dan untuk menyelenggarakan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kabupaten Mamberamo Tengah maka dibentuklah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah. Pembentukan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 18 Januari 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pedoman, kebijakan, petunjuk teknis, dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya dan layanan pengadaan barang/jasa serta memantau, mengevaluasi dan melaksanakan layanan pengelolaan system informasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

Provinsi Papua memiliki kekhususan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60):

1. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Tender Terbatas adalah Tender dengan pascakualifikasi yang pesertanya terbatas pada Pelaku Usaha Papua untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Setda Kabupaten Mamberamo Tengah kurang memadai dalam hal kepemilikan sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa terutama Pejabat Pembuat Komitmen. Sehingga berakibat pada banyak pengelola UKPBJ yang merangkap Jabatan pada beberapa kegiatan sehingga berakibat pada

kurang efektifnya kegiatan tersebut. Selain itu kepala OPD sebagai penanggungjawab Anggaran dan kegiatan cenderung menugaskan personel pengelola PBJ yang tidak memenuhi syarat karena keterbatasan SDM tersebut. jaringan internet di Kabupaten Mamberamo Tengah sangat kompleks, karena tidak selancar jaringan yang ada di kota-kota besar. Sehingga dalam penggunaannya belum konsisten kestabilan jaringannya terlebih lagi jika digunakan pada jam-jam kerja atau jam saat banyak yang menggunakan internet. Sudh dapat dipastikan bahwa jaringan internetnya tidak bisa digunakan bersama. Selain itu, tidak semua SDM yang ada di Setda Kabupaten Mamberamo Tengah memiliki keahlian dalam bidang komputer seperti pengelolaan komputer.

Artikel ini bertujuan untuk melihat Bagaimana Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada UKPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah dan Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada UKPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang ditemukan, Pendekatan ini sesuai dan relevan dengan judul artikel ini yaitu mencari efektifitas dari penggunaan *e-procurement* pada UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah. Informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa SETDA Kabupaten Mamberamo Tengah yang dalam sistem aplikasi SPSE dikenal dengan pengguna (*user*), Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa), Staf Pendukung Admin Sistem Informasi SPSE, Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Kontraktor. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah Wawancara, Observasi, Studi Kepustakaan dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada BPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah

Untuk mengetahui. terkait dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada BPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah, peneliti telah melakukan beberapa tahap analisis data serta wawancara dengan beberapa informan terkait. Melalui penerapan teori Duncan (1985) dan penghubungannya dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa dengan Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada BPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah sesuai dengan prinsip-prinsip teori dan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mencapai target yang diinginkan. Analisis lebih lanjut berdasarkan teori Duncan dalam (Steers, 1985) dapat ditemukan dalam uraian berikut:

Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya

maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pada spek pencapaian tujuan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985), mengemukakan beberapa item yaitu kurun waktu penyelesaian dan sasaran program.

Aspek pencapaian tujuan dari apa yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan di UKPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah sudah dilakukan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditentukan. Dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan telah dipahami dan diimplementasikan oleh UKPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah. Sehingga BPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan tujuannya dengan baik. Seperti telah melaksanakan prosedur dan SOP yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah. Proses penyelesaian hingga memperoleh penyedia barang dan jasa adalah 6 bulan, namun terkadang pada UKPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah memerlukan waktu yang leboh lama sehingga periode pekerjaan menjadi lebih pendek.

Dari hasil pemuan peneliti, dari 6 tahun berjalannya program *e-procurement* baru 2 tahun trakhir ini UKPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah mendapatkan waktu penyelesaian yang efektif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raldi, et al., (2021), dengan judul Efektivitas Penggunaan Aplikasi Klinik Aspirasi Dan Layanan Pengaduan (Kinalang) Pada Era New Normal Di Kota Kotamobagu menyatakan bahwa aplikasi KINALANG sebagai sarana penyaluran aspirasi dan pengaduan dari masyarakat kepada pemerintah, hal itu didasari oleh akses yang dianggap cukup mudah dan cepat untuk digunakan, masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini dalam satu tahun terakhir.

Keberhasilan dari tujuan suatu program tidak lepas dari item sasaran program. Adapun sasaran dalam menggunakan layanan *e-procurement* adalah Pelaku Pengadaan antara lain PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Vendor atau Penyedia Jasa. Berdasarkan hasil pencapaian tujuan yang diuraikan diatas jika disesuaikan dengan teori Duncan dalam Yoga, (2019), pencapaian tujuan dalam layanan UKPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah sudah efektif dilihat dari pencapaian target pekerjaan yang telah dicapai. Sehingga proses penggunaan aplikasi *e-Procurement* sudah dimaksimalkan oleh semua *user* dan proses pelelangan berjalan lancar.

Integrasi

Sosialisasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan sosialisasi. Maka dapat disimpulkan terkait aspek integrasi dari apa yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah sudah dilakukan dengan baik dimana sosialisasi dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dengan tatap muka langsung dan tidak hanya dilakukan satu kali dan mendatangkan pembicara yang berkompeten dari Kota Jayapura.

Berdasarkan hasil integrasi yang diuraikan diatas jika disesuaikan dengan teori Duncan dalam Yoga, (2019), integrasi dalam layanan UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah sudah dilakukan dengan baik dimana Sosialisasi yang dilakukan oleh UKPBJ bersifat langsung yang secara periodik rutin dilakukan. Sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada *user e-procurement* terkait penggunaan aplikasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek integrasi adalah aspek yang sudah dilakukan dengan baik oleh UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo

Tengah. Proses sosialisasi penggunaan aplikasi *e-procurement* dilakukan dalam kurun waktu dua kali dalam satu tahun dan berjalan selama 3 hingga 4 hari pelatihan.

Selain itu, dari temuan lapangan peneliti menyatakan bahwa pelatihan secara online *user* mengikutinya, namun ketika ada hal yang tidak bisa ditanyakan saat pelatihan *offline*, *user* dapat mencari informasi melalui internet seperti *youtube* dan *google*, sehingga ini menjadi nilai plus bagi UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah.

Sejalan dengan penelitian Wahana (2023), dengan judul efektivitas pengelolaan kearsipan dibagian pemerintahan sekretariat daerah Kota Batu mengenai pelaksanaan sosialisasi pengelolaan arsip, terungkap bahwa pegawai arsip di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu telah mengikuti sesi sosialisasi atau pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan & Arsip Kota Batu. Sosialisasi dilakukan secara langsung atau *offline*.

Adaptasi

Adaptasi adalah langkah penyesuaian diri yang diambil untuk mengharmonisasikan individu dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Keberhasilan adaptasi bisa diukur melalui perkembangan kemampuan pegawai dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Adaptasi dalam penelitian ini yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik terhadap perubah internal maupun perubahan eksternal (Novie Palar, et al, 2018). Adaptasi terdiri dari indikator, yaitu peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri dan sarana prasarana.

Aspek adaptasi terkait peningkatan kemampuan dalam menyesuaikan diri pada UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah kurang memadai karena terdapat 60%-70% Sumber Daya Manusia pada kantor UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada, terutama pada penggunaan aplikasi *e-procurement* bahkan ada beberapa pegawai yang belum mampu mengoperasikan komputer, ini yang menjadi salah satu penghambat dalam proses adaptasi dari program *e-procurement*.

Aspek adaptasi dari apa yang diuraikan diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana kantor seperti komputer, meja dan ruangan yang layak sudah terpenuhi namun sarana penunjang dalam layanan UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah kurang memadai terutama untuk sarana jaringan internet yang kurang stabil sehingga *user* sangat kesulitan saat menggunakan aplikasi *e-procurement*. Selain itu ada kendala SDM sebagai *user* dalam penggunaan aplikasi *e-procurement*. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang di atas bahwa masih ada *user* yang belum mempunyai sertifikat sehingga terjadi rangkap pekerjaan.

Berdasarkan hasil adaptasi yang diuraikan diatas jika disesuaikan dengan teori Duncan dalam Yoga, (2019), UKPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah belum memenuhi aspek adaptasi yang baik, karena masih terkendala dengan jaringan internet dan SDM yang belum memadai. Mengingat fasilitas sarana dan prasarana internet adalah aspek vital dalam menilai efektifitas suatu program.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakuakn oleh Wahana (2023), dengan judul Efektivitas Pengelolaan Kearsipan Dibagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu , kemampuan pegawai dalam mengelola arsip memiliki signifikansi yang besar dalam mencapai tujuan dan efektivitas pengelolaan arsip dalam konteks suatu organisasi. Dari hasil penelitian, tampak bahwa pada lokasi penelitian masih belum

optimal. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya pemahaman pegawai arsip mengenai praktik pengelolaan arsip yang sesuai. Disamping itu, latar belakang pendidikan juga memberi dampak pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan pra sarana yang kurang memadai pada arsip, terutama dalam hal lemari penyimpanan arsip, dan kekurangan ruang yang khusus untuk menampung arsip, yang mengakibatkan kurangnya penataan arsip yang teratur. Ketidacukupan fasilitas dan infrastruktur dalam kegiatan pengelolaan arsip dapat berakibat pada timbulnya konsekuensi negatif yang bermacam-macam, seperti ketidakteraturan penyimpanan arsip, kerusakan arsip hingga kehilangan arsip. Dengan demikian, kelayakan dari sarana dan pra sarana merupakan salah satu aspek yang wajib dilengkapinya karena merupakan aspek vital dalam efektivitas suatu program.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Pada BPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam penggunaan *e-procurement* adalah Bagian Layanan BPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM, selain itu melakukan pendampingan kepada OPD-OPD. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat faktor pendukung yang dapat menghasilkan keefektifitasan suatu program yaitu seringnya melakukan pelatihan dan pendampingan bagi *user* agar pencapaian tujuan dari suatu program berjalan dengan cepat dan lancar.

Faktor Penghambat

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti, bahwa faktor penghambat dalam penggunaan *e-procurement* pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Mamberamo Tengah adalah: Jaringan internet yang kurang memadai; Medan daerah Kobakma yang sulit untuk dijangkau; Permasalahan virus yang dapat mengganggu berjalannya aplikasi

SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Efektifitas Penggunaan efektifitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa SETDA Kabupaten Mamberamo Tengah terbagi menjadi 3 aspek yaitu : Pencapaian Tujuan, Pencapaian tujuan dalam layanan BPBJ Kabupaten Mamberamo Tengah sudah efektif dilihat dari pencapaian target pekerjaan yang telah dicapai. Sehingga proses penggunaan aplikasi *e-procurement* sudah dimaksimalkan oleh semua *user* dan proses pelelangan berjalan lancar; Integrasi, Integrasi dalam layanan BPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah sudah dilakukan dengan baik dimana Sosialisasi yang dilakukan oleh BPBJ bersifat langsung yang secara periodik rutin dilakukan; Adaptasi, UKBPBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah belum memenuhi aspek adaptasi yang baik, karena masih terkendala dengan jaringan internet dan SDM yang belum memadai.

Adapun Faktor Pendukung dan Penghambat dari efektifitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa SETDA Kabupaten Mamberamo Tengah adalah: Faktor pendukungnya yaitu peningkatan kemampuan SDM dan intensifitas pelatihan-pelatihan dan pengenalan suatu program kepada target sasaran; Faktor Penghambat dalam penggunaan *e-*

procument adalah PBJ Setda Kabupaten Mamberamo Tengah adalah: Jaringan internet yang kurang memadai, Medan daerah Kobakma yang sulit untuk dijangkau dan permasalahan virus yang dapat mengganggu berjalannya aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab. 2017. *Manajemen Strategi*. Makassar: Lemabaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Keppres Nomor 80/2003, pasal 3 tentang prinsip dasar (Dalam Maman Adde, 2010 : 241)
- Mansyar,Fenti.,Sadad, Abdul.(2014). “Kualitas Pelayanan Publik”. *Jurnal administrasi pembangunan, Vol.2 No.2 Maret*
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP. YKPN
- Murdianto Yoga, dkk. (2019). *Analisis Pengaruh Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Menggunakan Metode Servqual (Studi Kasus Go-Jek Kota Malang)*. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 3(1), 603-612.
- Steers, Richard M. 1977. *Efektivitas Organisasi*. Seri Manajemen No. 47, Jakarta : Erlangga
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Perpres 54 Tahun 2010, *Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*
- Perpres No 16/2018 Perka LKPP No 7 Tahun 2018
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *tentang Cipta Kerja*
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 2 Tahun 2019 *tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamberamo Tengah*.
- Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 5 Tahun 2016 *Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah*.
- Peraturan Bupati Mamberamo Tengah Nomor 2 Tahun 2019 *tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamberamo Tengah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;*